

POLA INTEGRASI EKONOMI DI KAWASAN ASIA TIMUR*

Yasmin Sungkar

Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI

Abstract

The writer argues that ASEAN should drive the economic integration in East Asia Region in an evolutionary manner and by involving as many stakeholders as possible. ASEAN, however, needs to show the tangible progress in the evolution path (i.e. from ASEAN community to East Asian Community). Trade is a good parameter to judge such a progress. As the dynamic of free trades requires an integrated, decisive and quick decision making process, the ASEAN's old tradition of non-interference and consensus which is deemed responsible for ASEAN's slow response, needs to be reviewed. ASEAN, too, needs to carefully review the format of 'ASEAN+X' and 'ASEAN-X' as a pragmatic solution to reconcile the pressing need to attain progress and the need to solve the socio-economic gaps among its members.

Keywords: *evolution, regional integration, free trade*

Pendahuluan

Maraknya regionalisme adalah suatu fenomena global karena baik negara kecil maupun negara besar telah menggunakan kesempatan ini untuk merespon perkembangan dan tantangan arus globalisasi. Mereka saling berintegrasi karena tidak mau tertinggal dalam arena persaingan bagi pasar ekspor dan investasi asing. Sementara negosiasi perdagangan multilateral berjalan sangat alot, negara-negara kecil mengharapkan regionalisasi ini bisa memperkuat posisi tawar mereka dan meraih pengaruh politik internasional. Proses integrasi ini mencakup aspek politik, kemandirian, ekonomi, dan sosial-budaya. Dari semua itu aspek ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian dan lebih dulu bergerak. Tidak terkecuali, ekonomi di Asia Timur juga mengarah ke fenomena populer ini pengaturan perdagangan bebas setelah mengalami perubahan drastis dalam tatanan ekonomi di kawasan Asia beberapa tahun terakhir.

* Tulisan ini disampaikan pada *Roundtable Discussion*, BPPK-Departemen Luar Negeri, Bandung, 19 Maret 2009.

180-80-25192

Apa yang sebenarnya menyebabkan ekonomi Asia Timur secara serius menuju ke integrasi ekonomi yang lebih kuat? Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi gerakan ini, dan berikut adalah dua alasan terpenting. *Pertama*, dan mungkin alasan yang paling kuat, adalah krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997 yang meruntuhkan sebagian besar ekonomi Asia Timur dan mengakibatkan sebagian mereka mengalami resesi berat. Krisis ini menjadi “*wake up call*” bagi Asia Timur yang kemudian mendorong usaha mereka ke arah integrasi yang lebih kuat yang diperlukan untuk membuat kawasan ini lebih berdaya tahan terhadap serangan serupa di masa depan. *Ke-dua*, liberalisasi perdagangan pada tingkat *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) tidak menghasilkan kemajuan yang berarti dan ditambah lagi dengan cepatnya perluasan integrasi ekonomi di daratan Eropa dan Amerika Utara. Uni Eropa sudah makin meluas dan menyambut negara-negara Eropa Timur untuk bergabung. Perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara (Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko) sudah berjalan, walaupun masih diwarnai perselisihan khususnya antara Amerika Serikat dan Kanada dalam beberapa komoditi, seperti hasil kayu, baja dan hasil peternakan. Sementara itu ekonomi Asia Timur sangat bergantung pada ekspor dan keuntungan dari integrasi ekonomi, yaitu meningkatnya daya saing dan menguatnya daya tawar, bisa menjamin akses pasar secara kontinu.

Cikal bakal integrasi kawasan Asia Timur sudah dimulai dengan berbagai jalur kerjasama ekonomi yang meliputi irisan berbagai wilayah, mulai dari kawasan ASEAN dan sub-ASEAN, kemudian berkembang mencakup tiga mitra dialog di Asia Timur dan sampai keikutsertaan India, Australia dan Selandia Baru. Makalah ini mencoba melihat evolusi kerjasama ekonomi regional Asia Timur.

Dari ASEAN Free Trade Area Menuju ASEAN Economic Community

Pada tahun 1992, negara-negara anggota ASEAN sepakat membentuk kawasan perdagangan bebas yang dikenal dengan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Tujuan akhir dari kesepakatan AFTA adalah meningkatkan daya saing di kawasan regional sebagai basis produksi untuk pasar dunia. Perlu diingat bahwa bagi negara-negara ASEAN, tercapainya AFTA bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai langkah persiapan untuk bisa bersaing dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Pada kenyataannya perkembangan di luar ASEAN, baik di Asia maupun di tingkat dunia, selalu menjadi faktor eksternal yang

mendorong percepatan terciptanya kawasan perdagangan bebas. Langkah penting ke arah ini adalah liberalisasi perdagangan melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif di antara anggota ASEAN. Selain dari penurunan tarif bagi produk yang diperdagangkan di kawasan ASEAN melalui skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*), pembentukan AFTA juga dimaksudkan untuk menciptakan pasar yang lebih besar sehingga dapat bersaing dengan China dan sekaligus menarik investasi asing. Paling tidak, negara-negara ASEAN masih dapat bertahan, atau *survive*, di tengah-tengah pesatnya kemajuan China, India dan negara-negara Asia Timur yang lain.

Sementara ASEAN perlu memperhatikan perkembangan di luar kawasan Asia Tenggara munculnya kekuatan ekonomi China, ide kawasan perdagangan bebas Asia Timur sebelum 2010 agar dapat menyesuaikan langkahnya dengan perubahan global, pada saat yang sama ASEAN juga harus menyelesaikan masalah internal. Kesepakatan AFTA yang ditandatangani tahun 1992 terganggu oleh krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia sejak 1997. Negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, mengalami kesulitan ekonomi yang sangat serius sehingga menimbulkan keraguan apakah AFTA bisa dilaksanakan. Masih adanya kecenderungan memproteksi industri domestik tertentu di masing-masing negara anggota bertentangan dengan prinsip liberalisasi dan dapat mengarah ke konflik baik di tingkat nasional maupun regional. Langkah mundur ini menunjukkan masalah yang serius di dalam ASEAN sendiri. Walaupun demikian, pemimpin ASEAN tidak surut dari komitmen mereka, bahkan merasa bahwa satu-satunya cara meringankan dampak krisis ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan mengurangi ketergantungan pada permintaan pasar global dan meningkatkan perdagangan regional.

Perkembangan terakhir dari realisasi AFTA ialah 99,77 persen produk dalam *inclusion list* ASEAN-6 sudah diturunkan tarifnya menjadi 0-5% dan sisanya yang masih dikenakan tarif di atas 5% adalah produk yang ditransfer pada tahun 2004 dari *temporary exclusion list*, *sensitive list*, *highly sensitive list* dan *general exception list*. Tarif rata-rata bagi ASEAN-6 sudah menurun

**...tercapainya AFTA
bukanlah tujuan akhir,
melainkan sebagai langkah
persiapan untuk bisa
bersaing dalam
menghadapi globalisasi
ekonomi.**

tajam dari 12,76% di tahun 1993 menjadi hanya 1,74%. Bahkan ASEAN-CMLV tidak tertinggal jauh dari kesepakatan awal CEPT dengan memasukkan 90,96 persen produk yang diperdagangkan di kawasan ke dalam *inclusion list* dan 76,68 persen dari produk tersebut sudah diturunkan tarifnya menjadi 0-5%.¹ Anggota baru ASEAN menunjukkan komitmennya pada AFTA dengan menetapkan jadwal untuk segera mentransfer produk-produk yang masih dalam *exclusion list* ke dalam *inclusion list*. Perdagangan intra-ASEAN menunjukkan perkembangan positif dimana ekspor dan impor meningkat masing-masing sebesar 15,9 dan 19,3 persen pada periode 2004-2005.² Namun disamping angka-angka yang mengesankan ini, perlu diingat pula bahwa perdagangan ASEAN secara total meningkat juga sehingga persentasi perdagangan intra-ASEAN terhadap perdagangan total ASEAN sebenarnya relatif tidak berubah, yaitu dari 24,3 menjadi 25 persen pada periode yang sama. Hal ini menggambarkan masih tingginya tingkat kompetitif dibanding komplementaritas intra-ASEAN sehingga mitra dagang di luar ASEAN masih tetap dianggap penting, kecuali untuk Laos dan Myanmar dimana Thailand menjadi mitra dagang utamanya. Dua tabel di bawah menunjukkan urutan mitra dagang utama negara anggota ASEAN. Krisis yang melanda dunia saat ini semestinya akan menggeser pola perdagangan menjadi lebih kuat ke dalam ASEAN karena permintaan yang menurun tajam dari mitra dagang utama ASEAN.

Tabel 1. Mitra Dagang Utama ASEAN (Ekspor 2007)

Brunei Darussalam	Jepang (32,8%), Indonesia (24,4%), Australia (13,4%), Korea Selatan (12,2%), Amerika (5,5%)
Cambodia	Amerika (58,1%), Jerman (7,3%), Inggris (5,2%), Kanada (4,6%), Vietnam (4,5%)
Filipina	Amerika (17%), Jepang (14,5%), Hongkong (11,5%), China (11,4%), Belanda (8,2%), Singapura (6,2%), Malaysia (5%), Jerman (4,3%)
Indonesia	Jepang (20,7%), Amerika (10,2%), Singapura (9,2%), China (8,5%), Korea Selatan (6,6%), Malaysia (4,5%), India (4,3%)
Laos	Thailand (32,7%), Vietnam (14,3%), China (5,9%), Korea Selatan (4,8%)

¹ Joint Media Statement of the Twentieth Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council, Kuala Lumpur, 21 Agustus 2006.

² Ibid.

Malaysia	Amerika (15,6%), Singapura (14,6%), Jepang (9,1%), China (8,8%), Thailand (5%), Hongkong (4,6%)
Myanmar	Thailand (44,3%), India (14,5%), China (7,1%), Jepang (5,7%)
Singapura	Malaysia (12,9%), Hongkong (10,5%), Indonesia (9,8%), China (9,7%), Amerika (8,9%), Jepang (4,8%), Thailand (4,1%),
Thailand	Amerika (12,6%), Jepang (11,9%), China (9,7%), Singapura (6,3%), Hongkong (5,7%), Malaysia (5,1%)
Vietnam	Amerika (20,8%), Jepang (12,5%), Australia (7,3%), China (6,9%), Singapura (4,5%)

Tabel 2. Mitra Dagang Utama ASEAN (Impor 2007)

Brunei Darussalam	Inggris (46,4%), Singapura (19,5%), Malaysia (11,3%)
Cambodia	Thailand (23,1%), Vietnam (16,9%), China (15%), Hongkong (10,4%), Singapura (7,5%), Taiwan (7,2%), Korea Selatan (4,8%)
Filipina	Amerika (14,1%), Jepang (12,3%), Singapura (11,2%), Taiwan (7,3%), China (7,2%), Saudi Arabia (6,4%), Korea Selatan (5,9%), Malaysia (4,1%), Thailand (4,1%)
Indonesia	Singapura (13,2%), China (11,5%), Jepang (8,8%), Malaysia (8,6%), Amerika (6,4%), Thailand (5,8%), Saudi Arabia (4,5%), Korea Selatan (4,3%), Australia (4%)
Laos	Thailand (68,5%), China (9,3%), Vietnam (5,5%)
Malaysia	Jepang (13%), China (12,9%), Singapura (11,5%), Amerika (10%), Taiwan (5,7%), Thailand (5,3%), Korea Selatan (4,9%), Jerman (4,6%), Indonesia (4,2%)
Myanmar	China (33,7%), Thailand (19,1%), Singapura (15,5%), Korea Selatan (5,8%), Indonesia (5,2%), Malaysia (4,2%)
Singapura	Malaysia (13,1%), Amerika (12,5%), China (12,1%), Jepang (8,2%), Taiwan (5,9%), Indonesia (5,6%), Korea Selatan (4,9%)
Thailand	Jepang (20,3%), China (11,6%), Amerika (6,8%), Malaysia (6,2%), United Arab Emirat (4,9%), Singapura (4,5%), Taiwan (4,1%)
Vietnam	China (19,9%), Singapura (12,1%), Taiwan (11%), Jepang (9,9%), Korea Selatan (8,5%), Thailand (6%)

Sumber: Dua tabel di atas adalah hasil kompilasi penulis dari *The 2008 World Factbook*, <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>>

Meskipun AFTA menunjukkan perkembangan yang positif, namun dirasa belum mencukupi kebutuhan ASEAN untuk berintegrasi secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, pada ASEAN Summit ke-9 di Bali pada tahun 2003 disepakati inisiatif baru untuk membentuk *ASEAN Community* dimana

salah satu pilarnya adalah *ASEAN Economic Community* (AEC). Tujuan AEC ini adalah menciptakan kawasan yang akan berfungsi sebagai pasar dan landasan produksi tunggal (*a single market and production base*) dimana barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal bisa bergerak bebas. Proses integrasi ekonomi ASEAN ini akan dijalankan melalui beberapa cara, yaitu: meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi, mempercepat liberalisasi perdagangan barang dan jasa, memperbaiki fasilitas perdagangan dan usaha, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah di ASEAN.³ Langkah penting dari usaha ini adalah disepakatinya percepatan integrasi atas 12 sektor prioritas yang dipilih berdasarkan keunggulan komparatif sumber alam, ketrampilan pekerja dan daya saing biaya serta kontribusi nilai tambah bagi perekonomian ASEAN. Target waktu bagi penghapusan tarif telah dipercepat dari 2010 menjadi 2007 untuk ASEAN-6 dan dari 2015 menjadi 2012 untuk ASEAN-CMLV. Dengan demikian sebenarnya ASEAN ingin membentuk kawasan perdagangan bebas + pasar tunggal yang nampaknya secara politis memungkinkan bila AFTA dan AEC berjalan.

Dibandingkan dengan Uni Eropa, organisasi ASEAN terbilang longgar dan sejauh ini belum mau menjalin ikatan yang ketat. Keinginan mempertahankan ikatan yang longgar ini bahkan secara eksplisit disebut di bagian awal Deklarasi Bali Concord II yang berbunyi: *“Reaffirming the fundamental importance of adhering to the principle of non-interference and consensus in ASEAN Cooperation”*.⁴ Padahal inti dari Deklarasi Bali Concord II adalah kesepakatan pemimpin ASEAN untuk membentuk Komunitas ASEAN yang berarti mengarah ke integrasi yang lebih luas dan dalam serta lebih mengikat. Nampaknya ASEAN masih nyaman dengan prinsip-prinsip lama walaupun hal ini tidak selalu menguntungkan dalam konteks ekonomi, khususnya mengingat perkembangan ekonomi dunia yang menuntut tindakan cepat. Mungkinkah ASEAN mentransformasikan diri dari kerjasama ekonomi regional menjadi suatu komunitas ekonomi sambil mempertahankan prinsip tersebut? ASEAN berharap bila suatu saat barang, jasa, modal dan investasi bisa bergerak bebas di kawasan, maka makin lama garis antara isu internal dan eksternal akan kabur sehingga anggota ASEAN akan terbuka satu sama lain baik secara ekonomis maupun politis. Sebenarnya ASEAN bisa melihat Uni

³ Ong Keng Yong, *“Comprehensive Integration Towards The ASEAN Community”*, pidato Sekjen ASEAN pada APEC Ministerial Meeting, Santiago, 18 November 2004.

⁴ Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), Bali, Indonesia, 7 Oktober 2003.

Eropa sebagai model dan inspirasi dalam proses menuju ke bentuk komunitas. Menyadari lemah dan lambatnya kerjasama ekonomi ASEAN yang disebabkan oleh fleksibilitas yang kabur, seperti kelonggaran waktu dalam rangka memproteksi industri domestik, maka muncul keinginan kuat organisasi ini agar ASEAN Charter memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum seperti *European Union Charter*. Dengan demikian ASEAN akan mempunyai mekanisme untuk memaksa, bahkan kalau mungkin menerapkan sanksi bagi anggotanya yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat sebagai langkah maju walaupun prinsip lama masih dipegang.

Kawasan ekonomi yang stabil dan berdaya saing tinggi yang hendak dicapai adalah kondisi dimana barang, jasa dan investasi bisa bergerak bebas, modal lebih bebas bergerak, pembangunan ekonomi yang setingkat, serta berkurangnya kemiskinan dan jurang sosial-ekonomi di tahun 2020. Sedangkan konsep pasar tunggal dan basis produksi ditujukan untuk mengembangkan kawasan ASEAN agar lebih dinamis dan kuat sehingga bisa menjadi bagian dari rantai pemasok global melalui perdagangan bebas barang dan jasa, serta iklim investasi yang terbuka. Pertimbangannya adalah investasi asing akan tertarik membangun jaringan produksi regional di negara-negara anggota ASEAN jika kawasan ASEAN menjadi bagian yang bisa diandalkan dari mata rantai produksi global dengan memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar dan keuntungan komparatif lokal. Strategi ASEAN dalam hal ini harus mencakup integrasi ASEAN dan peningkatan daya saing ekonomi ASEAN. Adapun usaha memperkecil jurang pembangunan dan mempercepat integrasi ekonomi anggota baru akan dilakukan melalui program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)* dan *Regional Integration Agreement (RIA)*⁵ sehingga keuntungan dari integrasi ASEAN bisa dirasakan semua anggota dan memungkinkan mereka melangkah bersama tanpa ada anggota yang tertinggal.

Namun pada kenyataannya perdagangan bebas dalam kerangka AFTA yang sudah dimulai sejak 1992 masih belum juga mendongkrak tingkat

⁵ IAI dicanangkan pada November 2000 untuk membantu negara-negara anggota baru dalam proses integrasi ekonomi dan menghindari munculnya dua lapisan dalam tubuh ASEAN. Empat bidang yang menjadi prioritas IAI adalah pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, teknologi informasi dan telekomunikasi, serta pembangunan kapasitas bagi integrasi ekonomi regional. Adapun rentang RIA bisa mulai dari kawasan perdagangan bebas sampai uni ekonomi. AFTA yang dimulai tahun 1992 adalah bentuk RIA yang dipilih anggota ASEAN. Pengaturan perdagangan bebas ini diawali dengan perdagangan barang dan kemudian diperluas mencakup liberalisasi perdagangan jasa dan arus investasi di kawasan.

perdagangan intra-ASEAN yang relatif kecil dibanding perdagangan total ASEAN. Pada saat Komunitas Ekonomi ASEAN mulai dicanangkan, persentase perdagangan intra-ASEAN terhadap perdagangan total semua anggota ASEAN hanya mencapai 22,1 persen. Sebagai perbandingan, pada saat yang sama perdagangan antar anggota dalam EU-25, NAFTA dan MERCUSOR⁶ masing-masing mencapai 67,3, 44,6 dan 14,9 persen.⁷ Rendahnya perdagangan intra-ASEAN ini antara lain dikarenakan masih adanya hambatan non-tarif, perbedaan standar produk dan belum harmonisnya prosedur bea-cukai. Persoalan lain yang sama pentingnya adalah kurang populernya skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) di kalangan swasta, kurang jelasnya aturan kandungan lokal dan belum kuatnya mekanisme penyelesaian masalah perdagangan. Oleh karena itu ASEAN membolehkan negara anggota yang belum siap berintegrasi untuk menyusul di kemudian hari agar tidak memperlambat anggota yang lebih siap. Alternatif ini dikenal dengan formula ASEAN-X (ASEAN *minus* X). Dokumen berisi saran bagi integrasi ekonomi ASEAN yang dilampirkan dalam Deklarasi Bali Concord II masih merekomendasikan formula ini dalam butir-butir di bawah sektor investasi dan perdagangan jasa. Bahkan di bagian awal dokumen rekomendasi secara eksplisit disebut bahwa dengan mengakui tidak semua anggota ASEAN bisa memenuhi jadwal yang direkomendasikan, maka disarankan adanya kelonggaran dalam implementasi program ekonomi sehingga negara-negara yang sudah siap bisa mulai terlebih dahulu.

Di samping formula ASEAN-X, bisa juga ditempuh pendekatan Dua+X di mana dua anggota ASEAN yang siap berintegrasi dalam sektor tertentu bisa menjalankannya lebih dahulu dan anggota lain bisa menyusul kemudian. Dalam hal ini berarti negara yang menyusul kemudian harus menerima ketentuan yang sudah disepakati dua anggota yang sudah lebih dulu berintegrasi. Kondisi demikian belum tentu menarik bagi anggota ASEAN yang sudah terbiasa dengan prinsip konsensus. Bahkan beberapa anggota ASEAN yang tidak puas dengan lambatnya integrasi ekonomi di kawasan secara individu melakukan pengaturan perdagangan dengan negara-negara di luar kawasan yang menjadi mitra dagang utamanya. Walaupun meningkatnya

⁶ EU-25 terdiri dari: Austria, Belgia, Cyprus, Ceko, Denmark, Estonia, Perancis, Finlandia, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Lithuania, Latvia, Luxemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugis, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris. NAFTA terdiri dari: Amerika, Kanada, Meksiko. MERCUSOR terdiri dari: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.

⁷ ASEAN Baseline Report: Measurements to Monitor Progress towards the ASEAN Community, ASEAN Secretariat: 2005, hal. 4.

perdagangan bilateral ini dikhawatirkan bisa melemahkan spirit AFTA, namun hal ini tidak terhindarkan selama negara-negara anggota belum bisa menyamakan langkah. ASEAN Way yang berpegang pada prinsip konsensus juga akan selalu membuka peluang bagi anggota yang lebih maju ekonominya untuk melangkah sendiri. Dengan demikian formula ASEAN-X yang dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi anggota yang belum mampu menyamakan langkah, pada akhirnya bisa menjadi formula X-ASEAN (X minus ASEAN) bagi anggota yang mau melangkah lebih cepat.

Walaupun tidak mudah untuk mencapai tingkat integrasi ekonomi yang lebih tinggi, sebenarnya saat ini kerjasama ekonomi ASEAN bukan pada tahap paling awal. ASEAN sudah meletakkan landasan dan menjalani proses integrasi ekonomi seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN Investment Area (AIA). Dalam perjalanan menuju sebuah komunitas ekonomi, ASEAN boleh dibilang sudah berada di tengah jalan dan perlu menciptakan mekanisme dan langkah-langkah baru untuk memperkuat implementasi kerjasama ekonomi yang sedang berlangsung; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; mempermudah pergerakan pengusaha dan tenaga terampil; serta memperkuat mekanisme institusi ASEAN.

Rendahnya perdagangan intra-ASEAN ini antara lain dikarenakan masih adanya hambatan non-tarif, perbedaan standar produk dan belum harmonisnya prosedur bea-cukai.

Dengan adanya tekanan yang makin kuat untuk melakukan negosiasi dalam pengaturan perdagangan bebas dengan kawasan di luar Asia Tenggara, ASEAN tidak bisa berjalan lambat. Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN menekankan pentingnya memperkuat hubungan dagang dengan kekuatan ekonomi di luar Asia Tenggara disamping mendorong integrasi ekonomi di dalam ASEAN sendiri. Hal ini mengingat perlunya memperkecil resiko perkembangan global yang tidak dapat dihindari, seperti melemahnya ekonomi Amerika, rendahnya pertumbuhan ekonomi di Eropa, dan masalah ekonomi di Jepang. Dalam rangka menuju kerjasama yang lebih luas ini, ASEAN melakukan pendekatan pada tiga kekuatan ekonomi di Asia Timur, yaitu Jepang, Korea Selatan dan China dan mulai melakukan dialog secara reguler dengan mereka. Meskipun dialog dengan berbagai mitra sudah

dimulai, ASEAN tetap berpegang pada prinsip lingkaran konsentris. Adalah lebih baik memulai kerjasama dengan tetangga terdekat dahulu, baru kemudian mencakup yang lain. Oleh karena itu prioritas tertinggi bagi ASEAN adalah percepatan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi yang lebih dalam melalui AFTA dan AEC. Semakin cepat proses AFTA dan AEC berjalan dan semakin awal hambatan perdagangan di dalam ASEAN diturunkan sampai titik terendah, maka semakin besar daya tarik ASEAN untuk dijadikan mitra dalam suatu perjanjian perdagangan bebas.

Namun apakah gambaran ideal di atas—mendahulukan AFTA dan AEC—bisa dicapai mengingat masih banyaknya kelemahan dalam proses keduanya? Ketika AFTA disepakati pada tahun 1992, belum ada FTA lain di ASEAN yang pada waktu itu masih terdiri dari enam anggota. Kemudian anggota baru ASEAN bergabung dan ikut serta dalam AFTA tetapi dengan jadwal waktu yang lebih lambat karena tingkat ekonomi yang berbeda. Dua lapis dalam diri ASEAN ini akan selalu mengakibatkan jadwal waktu yang berbeda dalam tiap kerangka kegiatan selama jurang perbedaan pembangunan ekonomi belum berhasil dipersempit. Selain komplementaritas intra-ASEAN yang rendah, skema CEPT belum dimanfaatkan secara optimal. Lebih dari itu, hambatan non-tarif seperti prosedur lisensi, standar teknik dan prosedur bea cukai masih menjadi penghambat proses integrasi ekonomi. Ditambah lagi dengan tidak adanya lembaga supranasional yang bisa mengharuskan anggota ASEAN mentaati keputusan-keputusan yang sudah diambil bersama, maka gaya ASEAN yang fleksibel akan tetap mewarnai proses menuju AFTA dan AEC.

Evolusi dan Signifikansi ASEAN+3

Kerjasama ASEAN+3 dimulai dengan dilakukannya pertemuan informal antara pemimpin ASEAN dan mitra mereka dari Asia Timur, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan saat berlangsungnya *ASEAN Informal Summit* ke-dua di Malaysia pada Desember 1997. Pada tahap awal ini fokusnya lebih ditekankan pada proses daripada kegiatan yang berorientasi kerja nyata. Namun baru pada tahun 1999 proses kerjasama ASEAN+3 ditetapkan sebagai forum resmi ketika para pemimpin kedua kawasan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai kerjasama Asia Timur pada *ASEAN Plus Three (APT) Summit* ke-tiga di Manila. Dari sinilah dimulai kerjasama yang sifatnya substantif dan laju interaksi menjadi semakin intensif. Saat itu para pemimpin ASEAN+3 menunjukkan ketetapan dan keyakinan yang tinggi dalam memperkuat dan memperdalam kerjasama Asia Timur di berbagai tingkat dan bidang,

khususnya di bidang ekonomi, sosial dan politik. Tidak lama kemudian, dihasilkan beberapa dokumen penting untuk menentukan arah kerjasama ASEAN+3. Dua dokumen yang terpenting adalah hasil laporan: 1) *East Asia Vision Group (EAVG)* tahun 2001 dan 2) *East Asia Study Group (EASG)* tahun 2002. Implementasi dari rekomendasi EASG ini bisa menjadi kerangka dasar pembangunan Komunitas Asia Timur.

Perkembangan kerjasama ASEAN+3 yang cukup pesat menuntut pengamatan secara terus-menerus. Ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu: apa motivasi dari kedua belah pihak (ASEAN dan *plus three*) yang mendorong mereka menjalin kerjasama; bagaimana ASEAN mempertahankan peran pentingnya—sebagai *driving force*—dalam kerjasama ASEAN+3, dan pada tingkat berikutnya bagaimana ASEAN+3 memperdalam dan memperluas kerjasamanya. Dalam hal perluasan kerjasama, *East Asia Summit (EAS)* mejadi isu penting dan memunculkan pertanyaan bagaimana posisi ASEAN+3 terhadap EAS. Apakah ASEAN+3 akan lebur ke dalam EAS atau berdampingan dalam perkembangannya nanti? Uraian berikut ini mencoba menjelaskan kondisi dan berbagai pandangan atas evolusi dan signifikansi ASEAN+3.

Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Keuangan

Dari perspektif ekonomi, motivasi yang mendorong ketiga negara Asia Timur menjalin kerjasama dengan ASEAN adalah: a) ASEAN dengan penduduk lebih dari 600 juta manusia merupakan pasar yang potensial untuk terus dikembangkan; b) ASEAN merupakan sumber bahan baku dan energi bagi ketiga negara tersebut; c) ASEAN dapat dijadikan tempat tujuan investasi bagi industri dari ketiga negara karena masih memiliki keunggulan kompetitif, seperti upah buruh yang relatif murah. Sementara itu Jepang percaya bahwa tujuan mengembangkan hubungan antara ASEAN dan Jepang adalah untuk mencapai kesejahteraan, perdamaian dan stabilitas di kawasan. Koizumi, bekas Perdana Menteri Jepang, mempromosikan “*act together and advance together*” sebagai cara mencapai tujuan tersebut. Pandangan lain adalah bahwa ASEAN tidak dipaksa untuk memperkuat hubungan eksternal dengan Asia Timur, tetapi ASEAN mengambil inisiatif untuk merangkul tetangganya. Memang krisis ekonomi Asia membawa Asia Tenggara dan Asia Timur ke arah kerjasama yang lebih erat. Negara-negara ASEAN memerlukan bantuan dan negara-negara Asia Timur mengulurkan bantuan. Namun kerjasama ASEAN+3 berkembang menjadi *equal partnership* dan negara *plus*

three melihat ASEAN sebagai suatu organisasi penting yang bisa memainkan peran yang signifikan di kawasan.

Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah konfigurasi kerjasama perdagangan ASEAN+3 benar-benar terdiri dari ASEAN sebagai satu entitas dan ketiga negara Asia Timur juga sebagai satu entitas, ataukah hanya akan merupakan kumpulan dari FTA yang bersifat bilateral. Sebenarnya negara-negara Asia Timur sedang berusaha untuk menjadi suatu entitas, namun tampaknya sangat sulit dilakukan karena terdapat *historical barrier* antar ketiga negara tersebut. Sebagai contoh, ketegangan antara China dan Jepang bisa menghambat proses diplomasi dan perundingan di antara keduanya. Lalu menjadi suatu pertanyaan apakah ketegangan ini akan membawa dampak negatif bagi kerjasama ASEAN+3. Rivalitas antara Jepang dan China ini cukup mengkhawatirkan dan kalau tidak mereda bisa "mementahkan" rencana membangun Komunitas Asia Timur. Namun di sisi lain, mengingat besarnya nilai perdagangan dan ketergantungan ekonomi yang tinggi di antara kedua negara, mereka percaya bahwa ketegangan politik tidak akan menghancurkan hubungan ekonomi. Khususnya bagi China yang berpegang pada prinsip "*treat your neighbours with kindness and work with your neighbours as partners*".

Hambatan sejarah bisa menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara ketiga negara tersebut, dan akan terus berkembang di masa-masa mendatang. Dalam situasi seperti ini, ASEAN sebagai unsur perekat kerjasama sangat dominan. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, faktor ASEAN yang dapat menjadikan negara *plus three* dapat duduk bersama-sama dalam forum ASEAN+3 diakui oleh ketiga negara tersebut. Dalam masa yang akan datang masih sulit diterima apabila salah satu dari tiga negara tersebut akan menjadi pemimpin Asia Timur, karena akan menimbulkan ketegangan di kawasan. Oleh karena itu posisi ASEAN masih sangat diperlukan dalam menjaga perdamaian, baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Timur. Namun demikian, perkembangan terakhir dimana pertemuan trilateral—Jepang, China, Korea Selatan—pertama sudah berlangsung tanpa kehadiran ASEAN menimbulkan pertanyaan apakah selanjutnya ASEAN akan tetap memainkan peran sentral dalam konfigurasi ASEAN+3.

Dalam kerjasama keuangan telah dibentuk pengaturan keuangan regional yang dikenal dengan "Chiang Mai Initiative" (CMI). Pengaturan ini memuat ketentuan ASEAN Swap Arrangement (ASA) dan jaringan *Bilateral Swap Arrangements* (BSAs) di antara negara anggota ASEAN, China, Jepang dan Korea Selatan. Sementara kemajuan yang sudah dicapai dalam kerjasama bidang keuangan dan moneter ialah dikembangkannya *Asian Bond Market*

Initiative (ABMI). Negara-negara ASEAN+3 berusaha memodifikasi peraturan yang ada untuk memudahkan pengeluaran surat obligasi dan investasi dalam satuan mata uang lokal dalam kerangka ABMI. Bahkan *Asian Bonds Online Website* (ABW) sudah diluncurkan sejak Mei 2004. Inisiatif ini didorong pengalaman pahit krisis Asia 1997 yang membuktikan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah ketergantungan yang tinggi pada pinjaman jangka pendek dari luar. Depresiasi mata uang lokal mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor dan kreditor asing sehingga terjadi pelarian modal dalam jumlah yang sangat besar. Dengan demikian banyak negara Asia yang kekurangan aset mata uang asing dan mengalami kesulitan dalam membayar hutang yang menumpuk.

Implementasi EASG

Menurut rekomendasi EASG, sebenarnya EAS digambarkan sebagai kelanjutan dari proses kerjasama ASEAN+3, dengan melibatkan negara-negara yang sama dan dilaksanakan saat proses ASEAN+3 sudah cukup matang. Langkah bertahap dan pendekatan sedikit demi sedikit ke arah EAS ternyata gugur saat ASEAN Summit ke-10 dan ASEAN+3 Summit di Vientiane pada November 2004. Saat itu para pemimpin memutuskan untuk menyelenggarakan EAS di Malaysia pada 2005 dan menugasi ASEAN's *Foreign Affairs Ministers* mempelajari lebih jauh ide EAS termasuk memikirkan prosedur yang harus diikuti dan seleksi anggota yang akan berpartisipasi. Dengan demikian, yang semula adalah tujuan jangka menengah-panjang, dipersingkat dalam waktu satu tahun. Lebih penting lagi ialah rencana semula bahwa ASEAN+3 akan mengalami transformasi ke dalam EAS sebagai refleksi perjalanan ke arah Komunitas Asia Timur, sekarang ASEAN+3 Summit berdampingan dengan EAS.

Namun tantangannya adalah bagaimana menjamin bahwa perhatian terhadap EAS tidak akan mengalihkan semangat yang seharusnya tetap menjadi usaha prioritas—membangun *ASEAN Community*. Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah berbeda dengan forum ASEAN+3 dimana negara anggota ASEAN berpartisipasi sebagai suatu kolektivitas "10" yang bekerjasama dengan +3, partisipasi dalam EAS sifatnya individual atau nasional. Konsekuensinya adalah keuntungan dari kekuatan kolektif ASEAN tidak akan muncul.

Bila negara-negara ASEAN+3 memperdalam kerjasama sektoral yang sudah ada dan berusaha mengimplementasikan program-program jangka menengah dan panjang, maka kerjasama ASEAN+3 bisa berkembang ke arah

terbentuknya Komunitas Asia Timur yang didukung tiga pilar, yaitu: kerjasama politik dan keamanan; kerjasama ekonomi dan keuangan; dan kerjasama sosial-budaya. Namun bersamaan dengan usaha ke depan ini, ASEAN+3 juga pada saat yang sama harus mengatasi beberapa tantangan seperti bagaimana mempertemukan kepentingan bersama mengingat adanya perbedaan di antara anggotanya, baik pada tingkat politik, ekonomi maupun sosial. Kemudian bagaimana menanggapi proses globalisasi dan dampaknya terhadap usaha-usaha integrasi, sejalan dengan usaha memperkecil jurang perbedaan antar anggota tersebut. Untuk itu laju kerjasama perlu disesuaikan sampai pada taraf dimana semua anggota bisa mengikutinya. Dengan menganut prinsip *outward looking* maka juga harus diingat keseimbangan antara kerjasama ASEAN+3 dan kerjasama dengan mitra dialog ASEAN lainnya, serta organisasi regional dan internasional yang lain.

Lebih lanjut diharapkan juga EAS ada nilai tambahnya walaupun belum ada pandangan yang jelas mengenai hal ini. Tidak mengherankan bila ada yang berpendapat bahwa EAS muncul terlalu awal (*premature*). Konsep Komunitas Asia Timur belum ditetapkan secara jelas bagi negara-negara *plus three* sehingga belum ada visi yang jelas. Apakah EAS merupakan kelanjutan dari ASEAN+3 Summit atau EAS harus berbeda secara geografis dan fungsional. Dalam beberapa isu fungsi ASEAN+3 bisa mencukupi, namun dalam beberapa isu lain fungsi ASEAN+3 tidak cukup. Dengan berbagai tantangan ini dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sudah bisa dipastikan usaha ini memerlukan waktu untuk bisa sampai terlihat keberhasilannya.

ASEAN+3: Katalisator bagi Komunitas Asia Timur?

Pada masa kini, kerjasama di bidang pembangunan sudah menjadi bagian integral dalam hubungan eksternal ASEAN. Kerjasama ini menjadi perekat yang bisa memperkuat hubungan ASEAN dengan mitra dialognya, sekaligus menciptakan *comfort level* bagi keduanya untuk memperluas dan memperdalam kerjasamanya. Kerjasama ASEAN dengan mitra dialognya semakin terfokus pada empat hal, yaitu: memperkuat kerjasama ekonomi, mendukung integrasi ASEAN--termasuk mempersempit kesenjangan pembangunan--, membicarakan isu transnasional, dan mempromosikan hubungan masyarakat. Kedua pihak juga semakin banyak menggunakan proses dialog untuk menciptakan mekanisme yang bisa meningkatkan jaringan ekonomi dan mempermudah arus investasi.

Strategi inilah yang membuat ASEAN lebih menengok ke Asia Timur karena adanya perubahan yang dinamis di tingkat regional dan global. Krisis keuangan 1997-1998 di Asia menyadarkan ASEAN dan mitranya di Asia Timur (Jepang, China dan Korea Selatan) bahwa mereka harus bekerja bersama-sama untuk menjamin stabilitas keuangan dan ekonomi makro di kawasan supaya dapat mencegah terulangnya krisis. Hal inilah yang membuat proses ASEAN+3 merupakan sebuah mekanisme penting untuk menjamin perdamaian dan kesejahteraan kawasan Asia Timur.

Dengan demikian menjadi jelas mengapa Mahathir tidak bersikeras melanjutkan gagasan *East Asia Economic Cooperation* (EAEC), yaitu karena ia berhasil menggolkan gagasan yang lebih tinggi. Sebagai tuan rumah, tahun 1997 ia memainkan peran penting pada pertemuan ASEAN+3 yang pertama, yang kemudian disusul dengan pertemuan ASEAN+1 masing-masing dengan Jepang, China dan Korea Selatan. Pernyataan bersama ASEAN-China setuju bahwa, "the maintenance of regional peace and stability served the interest of all parties, they undertook to resolve their differences or disputes through peaceful means, without resorting to the threat or use of force....". Pernyataan bersama ASEAN-Jepang menyatakan kesungguhan "to work together to ensure that future generations would live in peace and stability and that social and economic development would be sustained". Dalam pernyataan bersama ASEAN-Korea Selatan, kedua pemimpin setuju bahwa, "the stability and prosperity of Northeast and Southeast Asia were inter-linked and it was essential for both sides to work closely together for the mutual benefit of both regions".⁸ Nampak jelas bahwa tiga pernyataan terpisah di atas mengacu pada satu tema, yaitu bahwa kerjasama antara ASEAN dan masing-masing tiga negara Asia Timur akan menguntungkan dua pihak dan bisa menjadi landasan bagi kerjasama regional di Asia Timur.

Namun demikian, gagasan yang ideal ini harus mengingat juga kondisi yang berlangsung di dalam ASEAN sendiri. Negara mitra dialog tidak boleh lupa bahwa kerjasama ekonomi dengan ASEAN sangat tergantung pada seberapa cepat anggota baru ASEAN bisa mengejar ketertinggalannya dari anggota lama. ASEAN yang lebih terintegrasi akan memuluskan pengaturan perdagangan bebas dengan mitra dialog. Oleh karena itu adalah suatu indikasi yang positif jika mitra dialog bersama ASEAN membantu anggota baru

⁸ Termsak Chalermpananupap, "Towards an East Asia Community: The Journey Has Begun". Makalah dipresentasikan pada Fifth China-ASEAN Research Institute Roundtable on Regionalism and Community Building in East Asia, 17-19 Oktober 2002.

ASEAN lewat program pembangunan sub-regional (Mekong Basin). Mereka juga membantu ASEAN untuk melaksanakan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI). Tanpa didahului usaha-usaha di tingkat yang lebih awal, akan sulit menempatkan ASEAN+3 sebagai katalisator dalam menciptakan Komunitas Asia Timur.

Menuju Komunitas Ekonomi Asia Timur

Ide Komunitas Ekonomi Asia Timur pertama kali dilontarkan dalam laporan *East Asia Vision Group* (EAVG) tahun 2001 dengan judul "Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress". Dalam laporan ini digambarkan bahwa integrasi ekonomi Asia Timur nantinya akan menuju ke sebuah Komunitas Ekonomi Asia Timur. Sektor perdagangan, investasi dan keuangan akan menjadi katalisator dalam proses membangun komunitas tersebut. Sejalan dengan ini, EAVG mengusulkan dibentuknya *East Asia Free Trade Area* (EAFTA) dan *East Asia Investment Area* (EAIA). Ide ini berdasarkan pemikiran bahwa EAFTA akan memuat kawasan perdagangan bebas bilateral dan sub-regional di Asia Timur yang nantinya bisa meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara Asia Timur. Sudah mulai nampak bahwa pengaturan perdagangan bebas di Asia Timur mengambil bentuk "hub and spoke", seperti ASEAN-China, ASEAN-Jepang dan ASEAN-Korea Selatan, serta Jepang-Singapura, Jepang-Thailand dan Jepang-Filipina. Masih diperlukan analisa yang lebih dalam dan hati-hati untuk menjawab apakah bentuk pengaturan ini akan mengganggu atau menguntungkan EAFTA yang lebih luas.

Di atas sudah diuraikan alasan kuat yang mendorong integrasi Asia Timur, tapi seberapa jauh sebenarnya negara-negara di Asia Timur siap melakukannya? Apa yang bisa menghambat keinginan untuk memperkecil jurang perbedaan dan membentuk satu komunitas, yaitu Komunitas Asia Timur? Negara-negara di Asia Timur mungkin yang paling beragam jika dibandingkan dengan kawasan regional di betahan dunia lainnya. Keragaman ini nampak di berbagai aspek, seperti: latar belakang sejarah, sistem politik, struktur ekonomi, serta dimensi agama, sosial dan budaya. Sebagai contoh, dari segi struktur ekonomi, di satu sisi Jepang adalah negara industri yang sangat maju dan di sisi lain Laos dan Cambodia masih sangat bergantung pada pertanian. Dari segi struktur politik, Asia Timur terdiri dari sitem demokrasi, sosialis dan bahkan militeristik.

Di samping masalah perbedaan di berbagai aspek di atas, ada tiga hal penting yang bisa menjadi indikasi untuk melihat seberapa siap negara-negara Asia Timur melangkah ke Komunita Ekonomi Asia Timur, yaitu:

1. Tingkat pembangunan ekonomi dan pendapatan nasional. Berdasarkan angka *World Bank 2005*⁹, pendapatan per kapita Jepang adalah US\$ 37.180, Singapura US\$ 24.220 dan Korea Selatan US\$13.980 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam US\$ 550, Laos US\$ 390 dan Cambodia US\$ 320.
2. Derajat integrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral. Sebagian besar negara-negara ASEAN+3 sudah lama menjadi anggota WTO. China, Cambodia dan Vietnam belakangan sudah bergabung dalam WTO, sementara Laos masih harus melengkapi prosedur menjadi anggota.
3. Derajat dan pengalaman dalam integrasi ekonomi. Terlepas dari seberapa jauh keberhasilannya, boleh dibilang negara-negara ASEAN sudah lama berpengalaman dalam integrasi ekonomi dengan menjalankan *Preferential Trading Arrangement (PTA)* sejak 1977 dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* sejak 1992. Sementara negara yang lain termasuk pendatang baru dalam pengaturan perdagangan bebas.

Kenyataan lain adalah ekonomi negara anggota ASEAN relatif kecil dari segi tingkat pembangunan dan ukuran pasar, dibandingkan dengan tetangganya di Asia Timur, yaitu Jepang, China dan Korea Selatan. Di tingkat global, blok regional tumbuh dengan kuat di Eropa dan Amerika Utara, sementara hal ini belum terjadi di Asia. Pandangan yang optimis mengatakan bahwa Asia Timur harus merespon situasi ini dengan menunjukkan pada dunia bahwa dengan keragaman di berbagai aspek, masih ada peluang bagi negara-negara Asia Timur untuk melakukan kerjasama, koordinasi dan integrasi yang lebih dekat. Bila Komunitas Ekonomi Asia Timur terlaksana, berarti akan tercipta sebuah pasar yang besar dengan dua milyar penduduk atau hampir sepertiga penduduk dunia. Perdagangan yang mengalir dalam kawasan Asia Timur akhir-akhir ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan ekonomi antar 13 negara. Dengan demikian, berbagai pengaturan perdagangan bebas di kawasan bisa menaikkan arus perdagangan dan menjadi makin penting dalam proses menuju Komunitas Ekonomi Asia Timur.

⁹ http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm

Saat ini negara-negara Asia Timur bisa dikelompokkan dalam tiga kategori: negara maju (Jepang dan Singapura), negara berkembang (China, Korea Selatan dan ASEAN-6), dan negara kurang berkembang (CLMV--Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam). Tajamnya perbedaan tingkat pembangunan nyatanya tidak menyurutkan keinginan membentuk Komunitas Ekonomi Asia Timur, justru perlu diambil manfaatnya. Perusahaan manufaktur bisa memanfaatkan spesialisasi dan pembagian kerja regional. Industri-industri di negara maju yang memerlukan tenaga kerja rendah bisa direlokasi ke negara-negara yang kurang berkembang. Dengan demikian, integrasi ASEAN dengan Asia Timur akan menciptakan potensi ekonomi yang memberi keuntungan berarti bagi masyarakat Asia Timur di samping menciptakan "sense of belonging" terhadap komunitas regional yang lebih besar dan meningkatkan daya tawar di arena perdagangan multilateral serta pengaruh politik internasional.

Tantangan membangun Komunitas Asia Timur masih akan terus berlanjut. Bagaimana mengintegrasikan 13 negara yang memiliki perbedaan dalam sistem politik, ideologi, latar belakang sejarah, struktur ekonomi dan tingkat pembangunan, menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Mengingat sensitivitas tiap negara perlu dipertimbangkan, maka menggabungkan berbagai pengaturan perdagangan bebas yang ada untuk membentuk satu kawasan perdagangan bebas adalah sebuah pekerjaan yang rumit. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang pesimistis bila percaya bahwa akan memerlukan waktu lama untuk sampai pada komunitas yang didambakan tersebut, tapi lebih bersifat pandangan realistik.

Pemimpin ASEAN telah menyetujui bahwa *East Asia Summit* (EAS) yang pertama bermula dari proses inklusif yang terpisah dari ASEAN+3 yang sudah dipilih sebagai mekanisme kerjasama yang utama. Diterimanya India dalam forum baru ini, berarti Asia Timur sudah memasukkan negara demokrasi terbesar di dunia yang sudah tentu akan menambah dinamika di kawasan ini. Perluasan ini ditambah lagi dengan masuknya Australia dan Selandia Baru dari kawasan di bagian selatan untuk ikut serta. Perkembangan terakhir ini merupakan suatu hal yang baru bagi ASEAN, dan meningkatkan citra positifnya di mata internasional.

Selama berpuluh-puluh tahun ASEAN sangat menjaga teritorinya dan dengan ketat mempertahankan bahwa inisiatif baru apapun dari asosiasi ini tidak akan mengurangi rasa persatuan, norma dan prinsip yang sudah dianut selama ini. Citra non-eksklusif ini merupakan wajah baru ASEAN yang sebenarnya sudah lama didengungkan Indonesia dan Singapura. Oleh karena

itu kedua negara ini sangat mendukung pemikiran baru untuk membuka forum EAS bagi negara-negara mitra dialog lainnya di luar ASEAN+3. Dengan demikian EAS diproyeksikan akan menjadi motor pendorong yang penting bagi kawasan Asia Timur dan akan banyak tergantung pada sikap ASEAN selanjutnya. Apabila ASEAN mampu mempertahankan sikap *outward looking* yang tampak sekarang ini, maka EAS bisa berkembang dengan prospek yang positif. Meskipun demikian, sebagian anggota ASEAN masih merasa khawatir kehilangan pegangan atau larut dalam sebuah proses besar yang sebenarnya muncul dari inisiatif sebagian mereka. Oleh karena itu mereka ingin meningkatkan peran dan kendali ASEAN dengan usulan seperti pertemuan-pertemuan EAS agar tetap dipimpin oleh ASEAN.

Kesimpulan

Berbeda dengan krisis ekonomi Asia 1997, saat ini krisis ekonomi melanda seluruh dunia dengan sebab yang berbeda. Ketika pasar ekspor utama ASEAN, yaitu Amerika, Uni Eropa dan Jepang, mengalami krisis, maka secara langsung dampaknya dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Meskipun di antara ekonomi anggota ASEAN ada perbedaan derajat ketergantungan terhadap ekspor, pada dasarnya hampir semua anggota berorientasi ekspor. Singapura, Thailand dan Malaysia mengalami kontraksi ekspor luar biasa dan bisa dipastikan pertumbuhan ekonominya merosot. Reaksi spontan di hampir semua negara adalah tindakan proteksionis dan menahan laju pengangguran. Secara prinsip proteksionisme bertentangan dengan apa yang sudah dirintis ASEAN selama ini. Namun respon demikian adalah pilihan yang realistis untuk sementara waktu. Pertanyaannya, sampai kapan?

Sebenarnya pada saat pasar ekspor utama di luar ASEAN mengalami penurunan drastis, adalah tepat untuk menengok pasar di dalam ASEAN. Namun hal demikian tidak bisa diharapkan juga karena komplementaritas yang rendah antar anggota ASEAN. Dari berbagai pola yang sudah ada dalam konteks integrasi ekonomi regional, tampak ASEAN masih nyaman dengan cara-cara yang fleksibel dan tetap berpegang pada komitmen besar yang merangkul semua pihak. Namun bila diperhatikan, kerjasama bilateral sesungguhnya lebih menampakkan hasil konkrit. Hal ini bukan menjadi pilihan hitam-putih, tetapi percampuran antara pencapaian bentuk ideal dalam konteks regionalisme--Komunitas Ekonomi Asia Timur--dan realitas kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dua pihak.

Beberapa hal yang bisa disimpulkan adalah:

- Perluasan regionalisasi ASEAN—menjadi ASEAN+3, kemudian EAS, dan menuju Komunitas Asia Timur—perlu diikuti perluasan golongan yang seharusnya ikut terlibat dalam proses kerjasama ini. Selama ini baru sektor pemerintah, khususnya Departemen Luar negeri dan Perdagangan di masing-masing negara, yang berinisiatif dan menentukan arah kerjasama. Padahal tujuan kerjasama regional ini pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Asia Timur. Oleh karena itu kalangan akademis, sektor non-pemerintah dan pengusaha harus disertakan dalam proses regionalisasi ini.
- Dengan berlangsungnya transformasi dari kerjasama ASEAN+3 ke arah EAS dalam waktu singkat, yang mana sebenarnya merupakan salah satu rekomendasi jangka panjang EASG, dan tanpa mengurangi keyakinan terhadap prospek regionalisasi yang lebih luas, ASEAN harus tetap memperjuangkan prioritasnya, yaitu membangun ASEAN Community dengan tiga pilarnya.
- Kerjasama ASEAN+3 yang semakin luas cakupan bidangnya, bahkan tidak mustahil bisa menjadi ASEAN+6 di masa mendatang, membutuhkan institusi yang lebih fungsional sifatnya, tidak sekedar menjadi pusat administrasi.
- Salah satu konsekuensi dari perluasan regionalisasi dan pendalaman kerjasamanya adalah semakin banyaknya pertemuan di berbagai tingkat (kepala pemerintahan, menteri, pejabat senior, dan seterusnya) yang sudah tentu membutuhkan biaya yang makin tinggi. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara lain, misalnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengurangi biaya tersebut.
- Indonesia harus memperhatikan beberapa hal untuk bisa merebut investasi asing, seperti: memperpendek waktu pengurusan perijinan, menyederhanakan birokrasi (one roof service), aturan penanaman modal paling tidak sama sederhananya dengan yang ada di Thailand dan Malaysia dan harus konsisten.
- Dalam hal daya saing Indonesia yang relatif rendah dan tuntutan untuk bisa bersaing, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian ialah: pemerintahan yang efisien dan efektif, sektor swasta dan pengusaha yang efisien, dan infrastruktur yang memadai.